

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi umumnya bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Menurut ekonom klasik ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tertentu yaitu: tanah (sumberdaya alam), tenaga kerja (sumberdaya manusia) dan modal (Mulyadi, 2012).

Dewasa ini pembangunan ekonomi banyak meneliti tentang barang dan jasa daripada manusia. Pembangunan ekonomi ditunjukkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan persebarannya. Namun banyak cendekiawan dari negara maju yang mulai memperhatikan masalah sumberdaya manusia maupun perkembangan teknologi sebagai bahan analisis utama. Masalah sumberdaya manusia dapat berupa rendahnya kualitas tenaga kerja, terutama pada bidang-bidang yang paling diperlukan demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan (Rachbini, 2001).

Salah satu tujuan jangka panjang dari pembangunan nasional adalah dengan peningkatan sumberdaya manusia. Khususnya kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan kreatifitas masing-masing individu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen yang mengatakan bahwa bila manusia mampu mengoptimalkan potensi, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama (Ariyanto, 2012). Sen mengatakan bahwa jika setiap masyarakat dapat mengoptimalkan kemampuan, kualitas, dan

kreatifitas mereka maka, harapan memiliki kehidupan yang damai, tentram, dan sejahtera dapat tercapai.

Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dilihat melalui tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat kemampuan tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan dasar mereka sehari-hari mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan suatu keluarga. Salah satu hak-hak keluarga yang juga termasuk didalamnya adalah hak-hak dan kebutuhan anak sebagai anggota keluarga. Karena anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, sehingga mereka harus dipersiapkan sejak dini agar kelak ketika mereka dewasa dapat menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani, cerdas berbudi pekerti serta memiliki kemampuan untuk menjadi sumberdaya yang berkualitas dan memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Anak memiliki hak untuk tumbuh kembang sehingga orang tua dilarang untuk melantarkan anak mereka Seperti dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehingga UU tersebut maka pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seorang anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan pengeksploitasian terhadap anak, baik secara hukum, sosial ekonomi maupun politik.

Keterbatasan kemampuan ekonomi suatu keluarga menyebabkan keluarga miskin terpaksa mengerahkan sumberdaya keluarga mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi tersebut telah mendorong anak-anak yang masih belum mencapai usia kerja harus terpaksa bekerja.

Dalam tataran kebijakan, UUD 1945 mengatur bahwa “anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan anak, khususnya anak terlantar, termasuk anak jalanan. Untuk itu perlu adanya pembinaan bagi pekerja anak agar setiap anak mendapatkan hak mereka, termasuk untuk mendapatkan pendidikan.

Salah satu cara peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bisa dilakukan adalah dengan melalui pendidikan (khususnya pendidikan anak). Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1994 pasal 31 (ayat 1) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Namun ternyata masih banyak anak yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan seperti halnya hak mereka, berikut ini adalah jumlah data anak yang bekerja di Indonesia.

Tabel 1.1
Data Anak Bekerja di Indonesia Usia dibawah 15 tahun
Hasil Survei IFLS tahun 2007

Status bekerja	Frekuensi (anak)	Persentase (%)	Kumulatif (%)
Tidak	26,533	97.59	97.59
Bekerja	656	2.41	100.00
Total	27,189	100.00	

Sumber : Indonesia Family Life Survey (IFLS 4)

Berdasarkan data hasil survei *Indonesia Family life survey wave 4* terdapat 656 anak bekerja di Indonesia pada tahun 2007 atau sebesar 2,41% dari seluruh anak usia dibawah 15 tahun yang sudah memasuki dunia kerja. Jumlah ini sudah termasuk anak yang sekolah sambil bekerja maupun anak yang tidak sekolah

atau belum cukup umur untuk sekolah namun sudah bekerja. Sedangkan anak yang tidak bekerja terdapat 97,59% atau sebesar 26.533 anak dari seluruh anak usia dibawah 15 tahun.

Sedangkan hasil survei komnas PA menunjukkan sekitar 6,5 juta anak di Indonesia telah bekerja. Dari hasil tersebut 2,1 juta diantaranya bekerja pada lingkungan yang buruk seperti prostitusi, perdagangan anak, PRT, serta di lingkungan berbahaya lainnya. Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2009 mencatat sekitar 1,7 juta anak usia 5-17 tahun menjadi pekerja, yaitu usia 5-12 tahun sebanyak 674.000, 13-14 tahun sebanyak 321.000 dan usia 15-17 tahun sebanyak 759.000. Sebagian besar dari mereka bekerja lebih dari 15 jam seminggu bahkan hingga lebih dari 40 jam seminggu. United National Children's Fund (UNICEF) memperkirakan sekitar 30 persen PSK adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun bahkan ada beberapa yang masih dibawah 10 tahun, hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang memalsukan usia mereka khususnya perempuan. Selain itu sekitar 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan 10.000 anak diperdagangkan setiap tahunnya. Menurut data sakernas berdasarkan jenis pekerjaannya sebanyak 62% menjadi tenaga kerja di sektor pertanian, industri sebanyak 19%, dan sektor jasa sebanyak 19%. Yang memprihatinkan, 74% merupakan pekerja anak yang tidak dibayar karena statusnya adalah membantu orang tuanya, sementara 14% berstatus pekerja tetap di berbagai industri dan dibayar dengan upah rendah (puskapol).

Banyak anak-anak yang seharusnya dapat menghabiskan waktu mereka untuk bermain dan belajar justru terganggu karena harus bekerja membantu meringankan beban keluarga mereka, padahal sejatinya pendidikan adalah

modal penting bagi masa depan mereka. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kemampuan penduduk yang nantinya akan berdampak pada produktifitas dan kreatifitas mereka. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan sumberdaya dan teknologi menjadi mungkin untuk dilakukan, selain itu modal sosial juga akan meningkat seiring dengan tingginya pendidikan. Meier dan Rauch (2000) mengatakan pendidikan atau dalam arti lebih luas adalah modal sosial dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan (dalam Brata, 2002).

Berdasarkan UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa setiap warga usia 7-15 tahun harus wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, dan pada ayat 3 disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Berikut ini adalah data pendidikan terakhir yang ditamatkan anak di Indonesia.

Tabel 1.2
Data Pendidikan Anak Usia dibawah 18 tahun di Indonesia
Hasil Survei IFLS tahun 2007

Pendidikan Tertinggi Anak	Frekuensi (anak)	Persentase (%)	Kumulatif (%)
SD	5 104	72.32	72.32
SMP U	1 204	17.06	89.37
SMP K	19	0.27	89.64
SMU	16	0.23	89.87
SMK	9	0.13	90.00
Kejar Paket B	3	0.04	90.04
Pesantren	12	0.17	90.21
SLB	4	0.06	90.27
MI	381	5.40	95.66
MTs	305	4.32	99.99
Lainnya	1	0.01	100.00

Sumber : Indonesia Family Life Survey (IFLS 4)

Data diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi masih pada kisaran SD yaitu sebesar 72,32%. SMP U sebesar 17,06%, SMP K sebesar 0,27%, SMU sebesar 0,23%, SMK sebesar 0.13%, kejar Paket B sebesar 0.04%, Pesantren sebesar 0.17%, SLB sebesar 0.06%, MI sebesar 5.40%, MTs sebesar 4.32% dan Lainnya sebesar 0.01%. sebagian besar anak masih mendapatkan pendidikan yang relatif rendah yaitu SD atau lembaga pendidikan yang sederajat.

Pelabuhan kamal juga tidak luput dari permasalahan pekerja anak, dimana pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan penghubung antara Madura dengan

Surabaya yang mana banyak orang berlalu-lalang melintasi Pelabuhan tersebut. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang untuk berjualan makanan atau minuman, angkutan umum, hingga dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat nongkrong dan bersantai bersama teman-teman ataupun keluarga. Hal tersebut yang mungkin menjadi alasan anak untuk bekerja di daerah tersebut, karena semakin banyaknya orang yang berada di pelabuhan tersebut maka kemungkinan mendapatkan rezeki juga akan semakin besar.

Anak-anak yang bekerja di Pelabuhan Kamal biasanya bekerja sebagai pengemis, pengmen, dan pemulung. Padahal pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berbahaya untuk anak, dimana anak rawan terkena penyakit, polusi udara dan tertabrak kendaraan yang melintas. Dengan hadirnya jembatan suramadu, intensitas pengguna pelabuhan Kamal menjadi berkurang hal tersebut menyebabkan sebagian anak yang bekerja di daerah tersebut terpaksa pergi ke Surabaya agar hasil yang mereka dapatkan lebih besar, namun tentu dengan resiko yang lebih besar seperti putus sekolah.

Dengan rendahnya tingkat pendidikan anak maka akan mengakibatkan rendahnya tingkat kontribusi yang diberikan, tidak hanya pada keluarganya tetapi juga negara, karena tidak dipungkiri lagi bahwa anak-anak adalah calon generasi baru yang akan melanjutkan dan memimpin negara ini. Jika anak bangsa sekarang memiliki pendidikan tinggi maka dapat diasumsikan bahwa masa depan negara ini akan menjadi lebih maju. Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan bagi anak, jika dari awal anak sudah dilatih untuk bekerja maka akan ada *cost* atau biaya lain yang harus dibayar yang dalam hal ini adalah pendidikan mereka. ketika dewasa, Jika anak memiliki pendidikan rendah maka pendapatannya juga akan rendah karena kurangnya

bekal yang dibawa. Namun ternyata masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak mereka, masih banyak kita jumpai pekerja anak yang kurang beruntung tidak dapat mengenyam pendidikan seperti halnya hak mereka. Dengan melihat kondisi pekerja anak yang ada di Pelabuhan Kamal yang tidak sesuai dengan hak mereka, untuk itu penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Analisis Keputusan Anak untuk Bekerja (Studi kasus pada Anak Bekerja di Daerah Pelabuhan Kamal dan Sekitarnya)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang mempengaruhi keputusan anak untuk bekerja di Pelabuhan Kamal dan sekitarnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang mempengaruhi keputusan anak untuk bekerja yang ada di Pelabuhan Kamal dan sekitarnya.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian mengenai keputusan atau alasan anak untuk bekerja atau terpaksa bekerja ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor apakah yang menyebabkan pekerja anak yang ada di Pelabuhan Kamal dan sekitarnya.

1.4.2 Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian dapat menjadi tambahan referensi perbendaharaan kepustakaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa dalam menyusun penelitian ilmiah sejenis.

1.4.3 Bagi kalangan akademik dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas serta memberikan masukan bagi masyarakat secara umum, dan orang tua pada khususnya agar terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan anak dibawah umur untuk bekerja keras layaknya orang dewasa.